KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL

1721-B1

//							
KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK		H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 1 3 4 0 H.2 X Pembetulan Ke- 0 H.3 Pembatalan					
A. IDENTITAS PI	ENERIMA PENGHASIL	AN YANG DIPOTONG			•		
A.1 NPWP : 1 4 4 6 5 1 9 8 1 7 2 2 0 0 0							
A.2 NIK : [
A.3 Nama : SINGGIH NUGROHO							
B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG							
MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)	
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7	
4	21-402-01	1.698.400	1.698.400	0	5	84.920	
Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota B.8 Dokumen Referensi : Nomer Dokumen 037/SP2D-I S/BLUD-RS.IDAHM/IV/2022							
Solid Britains Color							
Nama Dokumen Blaya Pembayaran langgal 1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 0 2 2 9999 B.9 PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.							
Nomor: Tanggal dd mm yyyyy							
B.10 PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :							
B.11 PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :							
	EMOTONG PAJAK	9 5 3 3 5 0					
	ansi Pemerintah :			O O O	ΔΙ ΙΜΔΝΙΤΔΝ	J TIMI IR	
C.4 Tanggal :		1 3 dd 0 4 mm 2 0 2 2 yyyy					
TARK SOMADI						hanar dan talah saya	
C.6 Pernyataan	Wajib Рајак ;	tandatangani secara elektronik		tan Uniiikasi telan si	aya isi dengan	benar dan telah saya	
		Sesuai dengan ketentuan yang elektronik sehingga tidak diper	g berlaku, Direktorat Jenderal Pajal lukan tanda tangan.	k mengatur bahwa d	okumen ini tel	ah ditandatangani secara	

58C1RYUF